

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Pemilu di Kota Yogyakarta

Sebagai salah satu kota utama di Indonesia, Kota Yogyakarta tentu saja menyimpan dinamika-dinamika yang menarik dalam setiap pelaksanaan pemilu. Untuk melihat bagaimana dinamika politik dalam pemilu yang terjadi di Kota Yogyakarta, kita bisa menjadikan hasil perolehan kursi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Kota Yogyakarta dalam dua pemilu terakhir sebagai acuan.

Tabel 2.1

Perolehan Kursi Partai Politik Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pemilu 2009

No	Nama Partai	Perolehan Kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11
2	Partai Demokrat	10
3	Partai Amanat Nasional	5
4	Partai Keadilan Sejahtera	5
5	Partai Golongan Karya	5
6	Partai Persatuan Pembangunan	2
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
Total		40

Sumber: Website Resmi KPUD Kota Yogyakarta (<http://www.kpu-jogjakota.go.id/>)

Pada pemilu 2009, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat berhasil menguasai perolehan kursi DPRD Kota Yogyakarta yang berjumlah empat puluh kursi. Kedua partai tersebut

berhasil memperoleh lebih dari setengah jumlah kursi yang tersedia dengan rincian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh sebelas kursi sedangkan Partai Demokrat memperoleh sepuluh kursi. Lima belas kursi selanjutnya dikuasai oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang masing-masing memperoleh lima kursi, sementara itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengunci empat kursi terakhir dengan masing-masing memperoleh dua kursi.

Tabel 2.2
Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2009

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1	Megawati-Prabowo Subianto	65.801	29.12%
2	Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono	130.836	57.90%
3	Jusuf Kalla-Wiranto	29.326	12.98%
Total		225.963	100%

Sumber: Website Resmi KPUD Kota Yogyakarta (<http://www.kpu-jogjakota.go.id/>)

Pada pemilu 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melanjutkan dominasinya dalam perolehan kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil memperoleh lima belas kursi atau lebih banyak empat kursi dari perolehannya pada pemilu 2009. Di posisi berikutnya ada Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya yang masing-masing memperoleh lima kursi,

selanjutnya diikuti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan yang masing-masing memperoleh empat kursi. Dua kursi terakhir diperoleh oleh Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat yang merupakan partai baru dengan masing-masing memperoleh satu kursi.

Pergeseran yang sangat signifikan dapat kita lihat pada merosotnya perolehan kursi partai Demokrat. Partai Demokrat yang pada pemilu 2009 berhasil memperoleh sepuluh kursi DPRD Kota Yogyakarta hanya mendapatkan satu kursi pada pemilu 2014. Prahara yang terjadi di tubuh Partai Demokrat sebelum pelaksanaan pemilu 2014 memberikan dampak yang cukup besar bagi para pemilih di Kota Yogyakarta. Para pemilih cenderung enggan memilih calon legislatif dari partai yang bermasalah.

Tabel 2.3

Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2014

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1	Prabowo Subianto-Hatta Rajasa	98.441	39,96%
2	Joko Widodo-Jusuf Kalla	147.900	60,04%
Total		46.341	100%

Sumber: Website Resmi KPUD Kota Yogyakarta (<http://www.kpu-jogjakota.go.id/>)

Berbeda dengan pemilu 2009, kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam perolehan kursi DPRD Kota Yogyakarta pada pemilu 2014 kali ini berhasil diiringi juga dengan kemenangan pasangan kandidat yang diusungnya pada pilpres 2014.

Pasangan Jokowi-JK berhasil menang di Kota Yogyakarta dengan perolehan suara sebanyak 147.900 suara atau 60,04% dari total suara sah. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta hanya memperoleh 98.441 suara atau 39,96% dari total suara sah di Kota Yogyakarta. Kemenangan ini menunjukkan adanya peningkatan kesolidan antara para pengurus dan loyalis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam mendukung pasangan kandidat yang diusung.

2.2. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

2.2.1. Kedudukan KPU Kota Yogyakarta

KPU Kota Yogyakarta adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota. KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan anggota, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.

2.2.2. Tugas Pokok KPU Kota Yogyakarta

KPU Kabupaten/ Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota. Adapun tugas KPU Kota Yogyakarta adalah

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu
- b. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu

- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu
- d. Menetapkan peserta Pemilu
- e. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- f. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara
- g. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu
- i. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang

2.2.3. Fungsi KPU Kota Yogyakarta

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota
- b. Pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota
- c. Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan

- d. Perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum
- e. Pemberian dan pelayanan informasi Pemilu, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota
- f. Pengelolaan data Pemilu di Kabupaten/Kota
- g. Pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu
- h. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga
- i. Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota

2.2.4. Tugas Sekretariat

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
- b. Memberikan dukungan teknis administratif.
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur.

- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati/Walikota.
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.2.5. Kewenangan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

2.2.5.1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.5.2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- d. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2.6. Struktur KPU Kota Yogyakarta

2.2.6.1. Anggota KPU Kota Yogyakarta

- a. Wawan Budiyanto, S.Ag, MSI
- b. Hidayat Widodo, S.IP
- c. R. Moeh N. Aris Munandar, SE.
- d. Sri Surani, SP
- e. Siti Nurhayati, S.S.

2.2.6.2. Profil Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

- a. Ka. Sub Bag. Umum Indradi Yohananto, SH.
- b. Ka. Sub Bag. Hukum Purbaningsih, SH.
- c. Ka. Sub Bag. Teknis Pemilu & Hupmas Warisna Wijaya, S.IP.
- d. Ka. Sub Bag. Program dan Data Yurnelis Piliang, S.IP., MPA.

2.3.Organisasi Penyandang Difabel yang Mendorong Partisipasi Politik Difabel di Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta.

Organisasi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 melakukan pertemuan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi Difabel saat Pemilu. Pertemuan ini di inisiasi oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dan didukung oleh The Asia Foundation (TAF) .Adapun organisasi yang terlibat dalam peretmuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perwakilan organisasi Difabel D.I Yogyakarta

NO	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1.	Organisasi Sosial Penyandang Cacat (OSPC)
2.	Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI)
3.	Forum Peduli Difabel Bantul (FPDB)
4.	Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI)
5.	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Yogyakarta
6.	PERTUNI Yogyakarta
7.	Deaf Art Community (DAC) Kulon Progo
8.	Persatuan Penyandang cacat Kulon Progo (PPCKP)
9.	PERTUNI Kulon Progo
10.	SLB YAPENAS Sleman
11.	Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) Sleman
12.	Organisasi Difabel Mlati(ODM) Sleman
13.	Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS)

Sumber : SIGAB 2014

Dalam pertemuan ini gerakan difabel telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk mewujudkan pemilu yang inklusif. Rekomendasi ini tidak serta merta disusun tanpa adanya pemahaman akan permasalahan yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh narasumber saat wawancara bahwa saat pemilu legislatif tahun 2014 masih banyak ditemukan celah-celah pelanggaran sehingga hal ini harus segera dicarikan solusi bersama dengan organisasi Difabelnya agar permasalahan saat pemilu legislatif tidak terulang saat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.

Salah satu organisasi Difabel yang aktif menyuarakan dan mendorong partisipasi politik difabel adalah Sasana Integrasi dan Advokasi (SIGAB) adalah organisasi non pemerintah yang bersifat independen, nirlaba, dan nonpartisan. SIGAB didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2003. Organisasi yang mempunyai motto “Bersama Menuju Masyarakat Inklusi” ini mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif. SIGAB didirikan karena sampai saat ini kehidupan warga difabel masih dimarginalkan, baik secara struktural maupun kultural. Hak-hak warga difabel seperti hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi sampai pada penggunaan fasilitas publik tidak pernah diterima secara layak. Dengan kata lain, telah terjadi diskriminasi terhadap warga difabel.

SIGAB juga melakukan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Kekuatan Tawar Difabel dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo, Provinsi DIY. Bekerja sama dengan Yayasan TIFA yang dilakukan menjelang Pemilihan Umum 2009, dengan kegiatan antara lain: (1) Workshop Penyusunan Kurikulum dan Modul; (2) Pendidikan Politik; (3) Lobby dengan Parpol dan Caleg; (4) Deklarasi Politik Bela Bangsa; (5) Dialog Publik Jelang Pemilu Legislatif; (6) Workshop Penyusunan Strategi Advokasi Lanjut; (7) Lobby dengan DPRD Terpilih; (8) Konsultasi Publik; (9) Talkshow Radio; (10) Talkshow TV Lokal; (11) Workshop Evaluasi

SIGAB telah mampu memfasilitasi embrio pemilih kritis Difabel di 4 provinsi (Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Selain menghasilkan dokumentasi hasil pemantauan aksesibilitas PEMILU 2014, program yang didukung AIESP The Asia Foundation ini juga telah menghasilkan sebuah survei perspektif Difabilitas di kalangan calon legislator 2014, buku “PEMILU dan Gerakan Politik Kaum Difabel”, serta kampanye perspektif Difabel dan penguatan partisipasi Difabel dalam PEMILU 2014. Melalui program ini diharapkan ke depan, Difabel di area program dapat lebih aktif mengawal kinerja legislatif untuk lebih berperspektif Difabel

SIGAB melakukan pemantauan pemilu yang difokuskan pada berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak politik

difabel. Pemantauan dilaksanakan di 29 TPS di 21 kecamatan di seluruh DIY. Kelompok pemantau yang menamakan diri “Kelompok Difabel Pemantau Pemilu (KEDIPP) 2004 DIY” ini memantau pendataan pemilih, kampanye Pemilu, masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Kegiatan ini dilakukan untuk Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wapres.

SIGAB melakukan pendidikan Politik Dalam Rangka Membangun Partisipasi Politik Difabel Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Demokratis Dan Inklusif. Melalui dukungan The Asia Foundation / Aus Aid, program ini ditujukan untuk melakukan pendidikan politik kepada difabel di DIY, Jawa Timur, Kalimantan Timur serta Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan ruang dan partisipasi difabel dalam pesta demokrasi di negeri ini. Difabel, sebagai bagian integral warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, masih seringkali terpinggirkan pemenuhan hak politiknya. Selain akses fisik yang masih menjadi kendala besar bagi difabel untuk menggunakan hak suara memilihnya, hak dipilih serta keterwakilan politik yang masih kecil, kepentingan mereka juga hamper sama sekali tak terwakili oleh para pelaku politik. Itu barangkali sebabnya mengapa difabel dan kepentingan mereka tak banyak dibicarakan, bahkan tidak menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebijakan dan program pembangunan yang merupakan produk dari para actor politik. Selain mengedukasi difabel dan masyarakat akan hak politik difabel,

program ini juga akan mengukur tingkat perspektif difabilitas di kalangan partai politik dan calon legislatif.